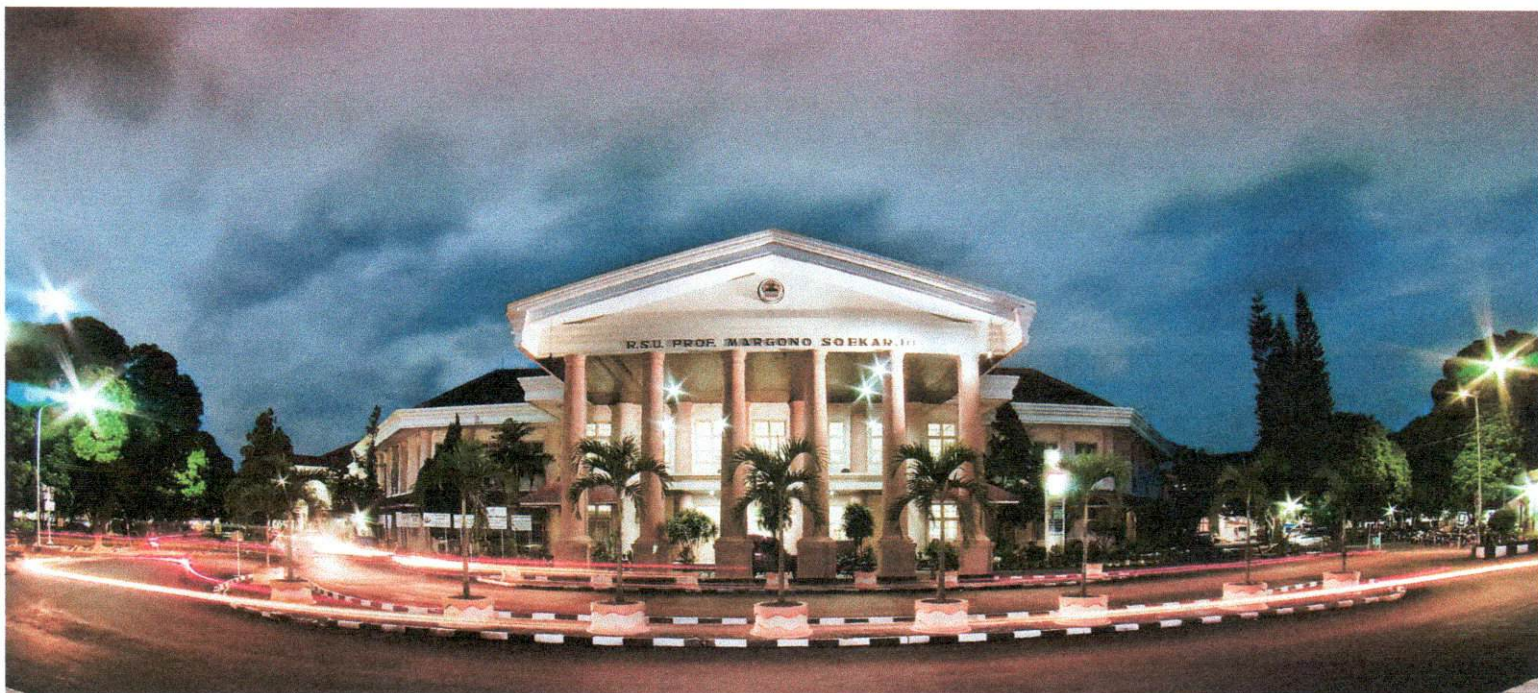




LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025



RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO



Jl. Dr. Gumbreg 1 Purwokerto
(0281) 632708 , fax. (0281) 631015
rsmargono@jatengprov.go.id
facebook.com/RSMargono
twitter.com/rsudmargono
instagram.com/rsudmargono
youtube.com/user/rsmargono

rsmargono.jatengprov.go.id
rsmargono.jatengprov.go.id/ppid
rsmargono.jatengprov.go.id/rsms-opendata
rsmargono.jatengprov.go.id/registrasi-online
rsmargono.jatengprov.go.id/wbs
rsmargono.jatengprov.go.id/tele_apik
rsmargono.jatengprov.go.id/intip-rena





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO



Jalan Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, Kode Pos : 53146, Telepon : (0281) 632708, Faksimile : (0281) 631015
laman : <http://rsmargono.jatengprov.go.id>, Pos-el : rsmargono@jatengprov.go.id.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, 28 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. HERI DWI PURNOMO, Sp.An.

NIP. 19661013 200604 1 001.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
RSUD Dr. MARGONO SOEKARJO

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rokok		-	-	-	-
9	Pajak Alat Berat		-	-	-	-
10	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)		-	-	-	-
11	Retribusi Daerah		584.183.800.000,00	909.500.137.860,00	155,69	769.086.700.599,00
12	Retribusi Jasa Umum		584.183.800.000,00	909.500.137.860,00	155,69	769.086.700.599,00
13	Retribusi Jasa Usaha		-	-	-	-
14	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	-	-
15	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-	-	-
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-	-	-
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-	-	-
19	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		15.816.200.000,00	26.197.850.789,00	165,64	18.384.128.455,00
20	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
21	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
23	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
24	Jasa Giro		-	-	-	-
25	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
26	Pendapatan Bunga		-	-	-	-
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-	-	-
29	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
31	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	-	-
33	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
34	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
35	Pendapatan BLUD		15.816.200.000,00	26.197.850.789,00	165,64	18.384.128.455,00
36	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
37	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	-	-
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
39	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
40	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
41	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-	-	-
42	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-	-	-
43	Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-	-	-
44	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
45	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		600.000.000.000,00	935.697.988.649,00	155,95	787.470.829.054,00
46						
47	PENDAPATAN TRANSFER					
48	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
49	Dana Perimbangan		-	-	-	-
50	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
51	Insentif Fiskal		-	-	-	-
52	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-	-	-
53	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-	-	-
54	Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-	-	-
55	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
56	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
57	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
58	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
59					-	
60	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				-	
61	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
62	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
63	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
64	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	-	-
65	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	-	-
66	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	-	-
67	Dana Darurat		-	-	-	-
68	Dana Darurat		-	-	-	-
69	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		-	-	-	-
70	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
71	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-	-	-
72	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara		-	-	-	-
73	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat		-	-	-	-
74	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
75					-	
76	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		600.000.000.000,00	935.697.988.649,00	155,95	787.470.829.054,00
77						
78	BELANJA DAERAH					
79	BELANJA OPERASI					
80	Belanja Pegawai		181.236.956.000,00	176.318.993.818,00	97,29	174.798.968.150,00
81	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		67.813.915.000,00	65.734.927.661,00	96,93	64.565.719.804,00
82	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		56.895.000.000,00	55.404.396.844,00	97,38	56.317.776.389,00
83	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		-	-	-	-
84	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
85	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-	-	-
86	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-	-	-
87	Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
88	Belanja Pegawai BOSP		-	-	-	-
89	Belanja Pegawai BLUD		56.528.041.000,00	55.179.669.313,00	97,61	53.915.471.957,00
90	Belanja Barang dan Jasa		580.499.317.000,00	559.239.621.957,00	96,34	585.035.352.970,00
91	Belanja Barang		-	-	-	393.059.500,00
92	Belanja Jasa		-	-	-	-
93	Belanja Pemeliharaan		-	-	-	-
94	Belanja Perjalanan Dinas		-	-	-	-
95	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		-	-	-	-
96	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
97	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
98	Belanja Barang dan Jasa BOSP		-	-	-	-
99	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-	-	-
100	Belanja Barang dan Jasa BLUD		580.499.317.000,00	559.239.621.957,00	96,34	584.642.293.470,00
101	Belanja Bunga		-	-	-	-
102	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
103	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
104	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
105	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
106	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
107	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
108	Belanja Subsidi		-	-	-	-
109	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
110	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
111	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
112	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
113	Belanja Hibah		-	-	-	-
114	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
115	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
116	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
117	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
118	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	-
119	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
120	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
121	Belanja Hibah Dana BOSP		-	-	-	-
122	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
123	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
124	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
125	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
126	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
127	Jumlah Belanja Operasi		761.736.273.000,00	735.558.615.775,00	96,56	759.834.321.120,00
128						
129	BELANJA MODAL					
130	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
131	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
132	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-	-	-
133	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		87.067.079.000,00	80.027.510.791,00	91,91	90.169.211.851,00
134	Belanja Modal Alat Besar		-	-	-	-
135	Belanja Modal Alat Angkutan		3.000.000.000,00	2.920.769.997,00	97,36	-
136	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	-	-
137	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
138	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		-	-	-	-
139	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		-	-	-	-
140	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		12.967.079.000,00	12.063.950.677,00	93,04	35.804.996.000,00
141	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
142	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-	-	-
143	Belanja Modal Komputer		-	-	-	-
144	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
145	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	-	-
146	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	-
147	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
148	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
149	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
150	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
151	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	-	-
152	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
153	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
154	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		-	-	-	-
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		71.100.000.000,00	65.042.790.117,00	91,48	54.364.215.851,00
156	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		100.000.000.000,00	33.000.394.670,00	33,00	-
157	Belanja Modal Bangunan Gedung		-	-	-	-
158	Belanja Modal Monumen		-	-	-	-
159	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	-	-
160	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	-	-
161	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		100.000.000.000,00	33.000.394.670,00	33,00	-
162	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
163	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
164	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	-	-
165	Belanja Modal Instalasi		-	-	-	-
166	Belanja Modal Jaringan		-	-	-	-
167	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-	-	-
168	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
169	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-	-	-
170	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	-	-
171	Belanja Modal Hewan		-	-	-	-
172	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	-	-
173	Belanja Modal Tanaman		-	-	-	-
174	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	-
175	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-
176	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
177	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	-
178	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		-	-	-	-
179	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-	-	-
180	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
181	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
182	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-	-	-
183	Jumlah Belanja Modal		187.067.079.000,00	113.027.905.461,00	60,42	90.169.211.851,00
184						
185	BELANJA TIDAK TERDUGA					
186	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
187	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
188	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
189						

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
190	BELANJA TRANSFER					
191	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
192	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-
193	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
194	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	-
195	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
196	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	-
197	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
198	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	-	-
199	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota		-	-	-	-
200	Jumlah Belanja Transfer		-	-	-	-
201						
202	JUMLAH BELANJA DAERAH		948.803.352.000,00	848.586.521.236,00	89,44	850.003.532.971,00
203						
204	SURPLUS/DEFISIT		(348.803.352.000,00)	87.111.467.413,00	(24,97)	(62.532.703.917,00)
205						
206	PEMBIAYAAN DAERAH					
207	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
208	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
209	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	-	-
210	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	-	-
211	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	-	-
212	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
213	Penghematan Belanja		-	-	-	-
214	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		-	-	-	-
215	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
216	Sisa Belanja Lainnya		-	-	-	-
217	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-	-	-
218	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
219	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
220	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
221	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
222	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
223	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
224	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
225	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
226	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
227	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
228	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
229	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
230	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
231	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
232	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	-	-
233	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	-	-
234	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	-	-
235	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	-	-
236	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
237	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan		-	-	-	-
238	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	-	-
239	Divestasi BLUD		-	-	-	-
240	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
241	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat		-	-	-	-
242	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
243						
244	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
245	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
246	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
247	Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
248	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
249	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
250	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
251	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
252	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
253	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
254	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
255	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
256	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
257	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
258	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
259	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	-	-
260	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	-	-
261	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	-	-
262	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	-	-
263	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
264	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan		-	-	-	-
265	Pinjaman BLUD		-	-	-	-
266	Investasi BLUD		-	-	-	-
267	Pembentukan Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
268	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
269	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-	-	-
270	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat		-	-	-	-
271	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
272					-	
273	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
274						
275	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(348.803.352.000,00)	87.111.467.413,00	(24,97)	(62.532.703.917,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

DIREKTUR RSUD dr. MARGONO SOEKARJO
RSUD Prof. Dr.
MARGONO SOEKARJO
dr. HERI BUDI PRNOMO, Sp.An.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
RSUD Dr. MARGONO SOEKARJO
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		183.205.721.675,93	265.246.593.290,09
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		183.205.721.675,93	265.246.593.290,09
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Kas Dana BOSP		-	-
13	Kas Dana Abadi Daerah		-	-
14	Investasi Jangka Pendek		-	-
15	Investasi dalam Saham		-	-
16	Investasi dalam Deposito		-	-
17	Investasi dalam SUN		-	-
18	Investasi dalam SBI		-	-
19	Investasi dalam SPN		-	-
20	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
21	Piutang Pajak Daerah		-	-
22	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
23	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
24	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
25	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
26	Piutang Pajak Rokok		-	-
27	Piutang Pajak Alat Berat		-	-
28	Piutang Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)		-	-
29	Piutang Retribusi Daerah		11.202.416.875,32	16.739.887.527,41
30	Piutang Retribusi Jasa Umum		11.202.416.875,32	16.739.887.527,41
31	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
32	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
33	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
34	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-
35	Piutang Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-
36	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-
37	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		369.650.979,79	599.857.666,39
38	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
39	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
40	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
41	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
42	Piutang Jasa Giro		-	-
43	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
44	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
45	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-
46	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
47	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		-	-
48	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-
49	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
50	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
51	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
52	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
53	Piutang Pendapatan BLUD		369.650.979,79	599.857.666,39
54	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
55	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
56	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
57	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
58	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
59	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
60	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-
61	Piutang Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-
62	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-
63	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan		-	-
64	Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah		-	-
65	Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah		-	-
66	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
67	Piutang Dana Perimbangan		-	-
68	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
69	Piutang Insentif Fiskal		-	-
70	Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-
71	Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-
72	Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-
73	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
74	Piutang Bagi Hasil		-	-
75	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
76	Piutang Lainnya		-	-
77	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
79	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
80	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
81	Uang Muka		-	-
82	Penyisihan Piutang		(6.598.818.620,87)	(6.439.210.426,12)
83	Penyisihan Piutang Pendapatan		(6.598.818.620,87)	(6.439.210.426,12)
84	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
85	Beban Dibayar Dimuka		429.465.303,25	440.125.902,04
86	Beban Dibayar Dimuka		143.099.699,45	153.785.765,03
87	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
88	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah		286.365.603,80	286.340.137,01
89	Persediaan		33.563.434.230,09	56.243.136.221,51
90	Barang Pakai Habis		33.562.002.330,09	56.243.136.221,51
91	Barang Tak Habis Pakai		1.431.900,00	-
92	Barang Bekas Dipakai		-	-
93				
94	JUMLAH ASET LANCAR		222.171.870.443,51	332.830.390.181,32
95				
96	INVESTASI JANGKA PANJANG			
97	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
98	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
99	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
100	Investasi dalam Obligasi		-	-
101	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
102	Dana Bergulir		-	-
103	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
104	Penyertaan Modal		-	-
105	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
106	Investasi Dana Abadi Daerah		-	-
107				
108	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
109				
110	ASET TETAP			
111	Tanah		104.929.400.000,00	104.730.000.000,00
112	Tanah		104.929.400.000,00	104.730.000.000,00
113	Peralatan dan Mesin		1.060.857.413.650,00	981.681.614.679,00
114	Alat Besar		21.208.346.104,00	21.208.346.104,00
115	Alat Angkutan		14.484.971.662,00	12.868.590.363,00
116	Alat Bengkel dan Alat Ukur		4.671.351.192,00	4.081.951.191,00
117	Alat Pertanian		43.982.500,00	43.982.500,00
118	Alat Kantor dan Rumah Tangga		89.524.051.864,00	84.000.738.869,00
119	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		8.205.052.616,00	8.196.290.736,00
120	Alat Kedokteran dan Kesehatan		792.578.878.252,00	734.286.032.530,00
121	Alat Laboratorium		78.828.992.131,00	66.731.271.858,00
122	Alat Persenjataan		-	-
123	Komputer		49.823.823.846,00	49.758.705.046,00
124	Alat Eksplorasi		-	-
125	Alat Pengeboran		-	-
126	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
127	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
128	Alat Keselamatan Kerja		-	-
129	Alat Peraga		1.372.883.883,00	390.625.882,00
130	Peralatan Proses/Produksi		95.000.000,00	95.000.000,00
131	Rambu-rambu		-	-
132	Peralatan Olahraga		20.079.600,00	20.079.600,00

NO	URAIAN	REF	2025	2024
133	Gedung dan Bangunan		370.425.082.967,00	370.189.290.967,00
134	Bangunan Gedung		369.916.882.967,00	369.681.090.967,00
135	Monumen		-	-
136	Bangunan Menara		-	-
137	Tugu Titik Kontrol/Pasti		508.200.000,00	508.200.000,00
138	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		4.811.419.430,00	4.672.449.850,00
139	Jalan dan Jembatan		-	-
140	Bangunan Air		175.000.000,00	175.000.000,00
141	Instalasi		515.891.455,00	376.921.875,00
142	Jaringan		4.120.527.975,00	4.120.527.975,00
143	Aset Tetap Lainnya		264.520.640,00	264.520.640,00
144	Bahan Perpustakaan		195.908.140,00	195.908.140,00
145	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		68.612.500,00	68.612.500,00
146	Hewan		-	-
147	Biota Perairan		-	-
148	Tanaman		-	-
149	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
150	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
151	Konstruksi dalam Pengerjaan		33.000.394.670,00	-
152	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
153	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah		-	-
154	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin		-	-
155	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan		33.000.394.670,00	-
156	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
157	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya		-	-
158	Akumulasi Penyusutan		(889.636.095.613,63)	(814.212.498.280,93)
159	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(797.695.786.710,30)	(729.868.282.238,70)
160	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(90.266.018.719,75)	(82.820.634.484,73)
161	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(1.674.290.183,58)	(1.523.581.557,50)
162	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
163	Aset Konsesi Jasa		-	-
164	Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi		-	-
165	Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
166	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
167	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		-	-
168	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi		-	-
169	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra		-	-
170				
171	JUMLAH ASET TETAP		684.652.135.743,37	647.325.377.855,07
172				
173	DANA CADANGAN			
174	Dana Cadangan		-	-
175	Dana Cadangan		-	-
176	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi		-	-
177	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi		-	-
178	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk		-	-
179	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk		-	-
180				
181	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
182				
183	ASET LAINNYA			
184	Tagihan Jangka Panjang		-	-
185	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
186	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
187	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
188	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
189	Aset Tak Berwujud		749.632.740,00	749.632.740,00
190	Aset Tak Berwujud		749.632.740,00	749.632.740,00
191	Aset Konsesi Jasa Aset Tidak Berwujud			
192	Aset Lain-lain		94.946.007.332,00	108.920.367.799,00
193	Aset Lain-Lain		94.946.007.332,00	108.920.367.799,00
194	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(746.388.603,00)	(733.412.055,00)
195	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(746.388.603,00)	(733.412.055,00)
196	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(93.845.606.041,84)	(107.477.783.720,09)
197	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(93.845.606.041,84)	(107.477.783.720,09)
198	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
199	Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka		-	-
200	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
201	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
202				
203	JUMLAH ASET LAINNYA		1.103.645.427,16	1.458.804.763,91
204				
205	PROPERTI INVESTASI			
206	Properti Investasi Tanah		-	-
207	Properti Investasi Tanah		-	-

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
208	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
209	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
210	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi		-	-
211	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
212	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-	-
213	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan		-	-
214				
215	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		-	-
216				
217	JUMLAH ASET		907.927.651.614,04	981.614.572.800,30
218				
219	KEWAJIBAN			
220	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
221	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
222	Utang Taspen		-	-
223	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
224	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
225	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
226	Utang PPh Pusat		-	-
227	Utang PPN Pusat		-	-
228	Utang Taperum		-	-
229	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
230	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-
231	Utang Bunga		-	-
232	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
233	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
234	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
235	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
236	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
237	Utang Bunga melalui BLUD		-	-
238	Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-
239	Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah		-	-
240	Utang Imbalan Pembiayaan Utang Daerah-Sukuk Daerah		-	-
241	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
242	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
243	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
244	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
245	Utang Pinjaman BLUD		-	-
246	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-
247	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
248	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
249	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
250	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
251	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
252	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek melalui BLUD		-	-
253	Bagian Lancar Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah		-	-
254	Pendapatan Diterima Dimuka		438.991.626,51	407.327.505,87
255	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		201.332.907,93	190.924.236,09
256	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	-
257	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
258	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa		237.658.718,58	216.403.269,78
259	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah		-	-
260	Utang Belanja		5.976.784.801,00	9.243.863.953,00
261	Utang Belanja Pegawai		-	-
262	Utang Belanja Barang dan Jasa		5.976.784.801,00	9.194.932.933,00
263	Utang Belanja Bunga		-	-
264	Utang Belanja Subsidi		-	-
265	Utang Belanja Hibah		-	-
266	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
267	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	48.931.020,00
268	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
269	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
270	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
271	Utang Belanja Tidak Terduga		-	-
272	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
273	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
274	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-	-
275	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-
276	Utang Belanja Bantuan Sosial		-	-
277	Utang Belanja Imbalan		-	-
278	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
279	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
280	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-

NO	URAIAN	REFF	2025	2024
281	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
282	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
283				
284	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		6.415.776.427,51	9.651.191.458,87
285				
286	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
287	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
288	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
289	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
290	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
291	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
292	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		-	-
293	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD		-	-
294	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta		-	-
295	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
296	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN		-	-
297	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD		-	-
298	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta		-	-
299	Utang kepada Masyarakat		-	-
300	Obligasi		-	-
301	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
302	Kewajiban Konsesi Jasa		-	-
303	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari		-	-
304	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah		-	-
305	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah		-	-
306	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah		-	-
307	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari		-	-
308	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-
309	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah		-	-
310	Utang Pinjaman Daerah dari LKB		-	-
311	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga		-	-
312	Utang Pinjaman Daerah dari LKBB		-	-
313				
314	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
315				
316	JUMLAH KEWAJIBAN		6.415.776.427,51	9.651.191.458,87
317				
318	EKUITAS			
319	EKUITAS		820.674.622.885,54	855.095.100.736,43
320	Ekuitas		721.845.341.132,80	844.597.950.729,52
321	Surplus/Defisit-LO		98.829.281.752,73	10.497.150.006,91
322	Ekuitas SAL		-	-
323	Estimasi Pendapatan		-	-
324	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
325	Apropriasi Belanja		-	-
326	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-
327	Estimasi Perubahan SAL		-	-
328	Surplus/Defisit-LRA		-	-
329	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		80.837.252.301,00	116.868.280.605,00
330	RK PPKD		80.837.252.301,00	116.868.280.605,00
331				
332	JUMLAH EKUITAS		901.511.875.186,54	971.963.381.341,43
333				
334	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		907.927.651.614,04	981.614.572.800,30

 DIREKTUR
RSUD DA MARGONO SOEKARJO
dr. HERI DWI PURNOMO, Sp.An.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MARGONO SOEKARJO
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REF	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan - LO		-	-	-	-
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	-
9	Pajak Alat Berat-LO		-	-	-	-
10	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)-LO		-	-	-	-
11	Retribusi Daerah - LO		903.964.299.232,91	776.059.069.867,50	127.905.229.365,41	16,48
12	Retribusi Jasa Umum - LO		903.964.299.232,91	776.059.069.867,50	127.905.229.365,41	16,48
13	Retribusi Jasa Usaha - LO		-	-	-	-
14	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	-
15	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	-
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	-
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-	-	-
19	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		25.946.388.653,61	18.765.733.341,48	7.180.655.312,13	38,26
20	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
21	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
22	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
23	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	-
24	Jasa Giro - LO		-	-	-	-
25	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	-
26	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	-
27	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO		-	-	-	-
28	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		-	-	-	-
29	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	-
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	-
31	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	-
32	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-	-
33	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	-
34	Pendapatan dari Pengembalian - LO		-	-	-	-
35	Pendapatan BLUD - LO		25.946.388.653,61	18.765.733.341,48	7.180.655.312,13	38,26
36	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
37	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	-
38	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	-
39	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	-
40	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	-
41	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	-
42	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO		-	-	-	-
43	Pendapatan Konsesi Jasa		-	-	-	-
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing-LO		-	-	-	-
45	Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO		-	-	-	-
46	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-LO		-	-	-	-
47	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-LO		-	-	-	-
48	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		929.910.687.886,52	794.824.803.208,98	135.085.884.677,54	17,00
49						
50	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
51	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	-
52	Dana Perimbangan- LO		-	-	-	-
53	Dana Insentif Daerah (DID)- LO		-	-	-	-

54	Insentif Fiskal-LO	-	-	-	-
55	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	-	-	-	-
56	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	-	-	-	-
57	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	-	-	-	-
58	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	-	-	-	-
59	Pendapatan Bagi Hasil- LO	-	-	-	-
60	Bantuan Keuangan- LO	-	-	-	-
61	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	-	-	-	-
62					
63	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO				
64	Pendapatan Hibah- LO	6.191.814.670,03	7.762.805.854,80	(1.570.991.184,77)	(20,24)
65	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	-	1.094.310.425,00	(1.094.310.425,00)	(100,00)
66	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO	4.923.226.815,03	3.618.103.719,80	1.305.123.095,23	36,07
67	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO	119.000,00	-	119.000,00	-
68	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO	366.500.000,00	2.755.348.000,00	(2.388.848.000,00)	(86,70)
69	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	901.968.855,00	295.043.710,00	606.925.145,00	205,71
70	Dana Darurat- LO	-	-	-	-
71	Dana Darurat- LO	-	-	-	-
72	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	-	-	-
73	Lain-lain Pendapatan- LO	-	-	-	-
74	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	-	-	-	-
75	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-LO	-	-	-	-
76	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat-LO	-	-	-	-
77	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO	-	-	-	-
78	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO	-	-	-	-
79	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	6.191.814.670,03	7.762.805.854,80	(1.570.991.184,77)	(20,24)
80					
81	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH -LO	936.102.502.556,55	802.587.609.063,78	133.514.893.492,77	16,64
82					
83	BEBAN				
84	BEBAN OPERASIONAL				
85	Beban Pegawai	176.318.993.818,00	174.798.968.150,00	1.520.025.668,00	0,87
86	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	120.023.921.974,00	117.210.641.761,00	2.813.280.213,00	2,40
87	Beban Tambahan Penghasilan ASN	55.404.396.844,00	56.317.776.389,00	(913.379.545,00)	(1,62)
88	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	890.675.000,00	1.270.550.000,00	(379.875.000,00)	(29,90)
89	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-
90	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-
91	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-
92	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-
93	Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-
94	Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-
95	Beban Barang dan Jasa	582.032.945.958,57	549.268.998.238,14	32.763.947.720,43	5,97
96	Beban Barang	303.060.050.999,79	272.033.388.210,31	31.026.662.789,48	11,41
97	Beban Jasa	250.475.749.782,78	243.919.181.207,83	6.556.568.574,95	2,69
98	Beban Pemeliharaan	27.708.681.724,00	32.035.186.989,00	(4.326.505.265,00)	(13,51)
99	Beban Perjalanan Dinas	788.463.452,00	1.281.241.831,00	(492.778.379,00)	(38,46)
100	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-
101	Beban Penunjang Otonomi Khusus	-	-	-	-
102	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-
103	Beban Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-
104	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	-	-	-	-
105	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-
106	Beban Bunga	-	-	-	-
107	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
108	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
109	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-
110	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	-	-	-
111	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	-	-	-	-
112	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD	-	-	-	-
113	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah	-	-	-	-
114	Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah	-	-	-	-
115	Beban Subsidi	-	-	-	-
116	Beban Subsidi kepada BUMN	-	-	-	-
117	Beban Subsidi kepada BUMD	-	-	-	-
118	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	-
119	Beban Subsidi kepada Koperasi	-	-	-	-
120	Beban Hibah	1.242.000.000,00	-	1.242.000.000,00	-
121	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
122	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.242.000.000,00	-	1.242.000.000,00	-
123	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-
124	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-

125	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-
126	Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	-
127	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-
128	Beban Hibah Dana BOSP	-	-	-	-
129	Beban Hibah kepada BUMDesa	-	-	-	-
130	Beban Hibah kepada Koperasi	-	-	-	-
131	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
132	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	-
133	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	-
134	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
135	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-
136	Beban Penyisihan Piutang	160.782.388,31	239.750.499,18	(78.968.110,87)	(32,94)
137	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
138	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	160.767.388,31	237.945.731,40	(77.178.343,09)	(32,44)
139	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
140	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.000,00	1.804.767,78	(1.789.767,78)	(99,17)
141	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
142	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
143	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
144	Beban Penyusutan dan Amortisasi	77.161.401.050,29	67.782.742.169,55	9.378.658.880,74	13,84
145	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	69.592.023.294,52	60.218.845.346,94	9.373.177.947,58	15,57
146	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.405.692.581,69	7.401.369.728,36	4.322.853,33	0,06
147	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.708.626,08	149.550.546,25	1.158.079,83	0,77
148	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
149	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
150	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	12.976.548,00	12.976.548,00	-	-
151	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
152	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-
153	Beban Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
154	Beban Imbalan	-	-	-	-
155	Beban Imbalan Sukuk Daerah	-	-	-	-
156	Jumlah Beban Operasional	836.916.123.215,17	792.090.459.056,87	44.825.664.158,30	5,66
157					
158	BEBAN TRANSFER				
159	Beban Bagi Hasil	-	-	-	-
160	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	-	-	-	-
161	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
162	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-
163	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
164	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-
165	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-
166	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	-	-	-
167	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-	-	-
168	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	-
169					
170	JUMLAH BEBAN	836.916.123.215,17	792.090.459.056,87	44.825.664.158,30	5,66
171					
172	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL	99.186.379.341,38	10.497.150.006,91	88.689.229.334,47	844,89
173					
174	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
175	SURPLUS NON OPERASIONAL				
176	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
177	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
178	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
179	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	-	-	-	-
180	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
181	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-
182	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-	-
183	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	-
184	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	-	-	-	-
185	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
186	Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah	-	-	-	-
187	Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah	-	-	-	-
188	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	1.166.033,43	-	1.166.033,43	-
189	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	1.166.033,43	-	1.166.033,43	-
190	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
191	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi	-	-	-	-
192	Jumlah Surplus Non Operasional	1.166.033,43	-	1.166.033,43	-
193					

194	DEFISIT NON OPERASIONAL				
195	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	358.263.622,08	-	358.263.622,08	-
196	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	358.263.622,08	-	358.263.622,08	-
197	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
198	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
199	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
200	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
201	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	-	-	-	-
202	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	-	-	-	-
203	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	-	-	-	-
204	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
205	Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah	-	-	-	-
206	Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah	-	-	-	-
207	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
208	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	-	-	-	-
209	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
210	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi	-	-	-	-
211	Jumlah Defisit Non Operasional	358.263.622,08	-	358.263.622,08	-
212					
213	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(357.097.588,65)	-	(357.097.588,65)	-
214					
215	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	98.829.281.752,73	10.497.150.006,91	88.332.131.745,82	841,49
216					
217	POS LUAR BIASA				
218	BEBAN LUAR BIASA				
219	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
220	Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
221	Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-	-
222	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
223					
224	JUMLAH POS LUAR BIASA	-	-	-	-
225					
226	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	98.829.281.752,73	10.497.150.006,91	88.332.131.745,82	841,49

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

DIREKTUR

RSUD Dr. MARGONO SOEKARJO

dr. HERI DWI PURNOMO, Sp.An.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
RSUD Dr. MARGONO SOEKARJO
Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

NO	URAIAN	2025	2024
1	Ekuitas Awal	971.963.381.341,43	844.874.301.449,65
2	Surplus/Defisit-LO	98.829.281.752,73	10.497.150.006,91
3	RK PPKD	80.837.252.301,00	116.868.280.605,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(250.118.040.208,63)	(276.350.720,13)
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	(250.000.000.000,00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD	(250.000.000.000,00)	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	(1.632.025,00)	(277.665.962,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		13.575.862,00
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi	(1.632.025,00)	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		(291.241.824,00)
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	8.160,13	1.315.241,87
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		(5.603.122,25)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang	8.160,13	6.918.364,12
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(1.214.904.700,00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		

	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(1.214.904.700,00)	
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	1.098.488.356,25	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	1.098.488.356,25	
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Pemanfaatan		
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya		
4.13	Koreksi/Penyesuaian Properti Investasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Properti Investasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Properti Investasi dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Properti Investasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Properti Investasi dari Mutasi Antar SKPD		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Properti Investasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Properti Investasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Properti Investasi		
4.15	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Pendapatan Diterima Dimuka		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Pendapatan Diterima Dimuka		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Pegawai		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Pegawai		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Utang Belanja Barang dan Jasa		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Utang Belanja Barang dan Jasa		
4.16	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain		
5	Ekuitas Akhir	901.511.875.186,54	971.963.381.341,43


DIREKTUR
RSUD Dr. MARGONO SOEKARJO
dr. HERNI DWI PURNOMO, Sp.An.